BAB VI

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Oleh Dewi Triwahyuni

TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

INTERNAL

Yaitu, masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri (faktor domestik), antara lain :

- krisis multidimensi yang berkepanjangan
- Otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya
- Isu-isu disintegrasi bangsa

EKSTERNAL

Yaitu, masalah-masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negara, seperti :

- Globalisasi yang tidak dapat dihindari
- Isu-isu perdagangan bebas

Beberapa hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi (1998) yang lalu :

1. Pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang & impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan.
2. Pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki pondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh.

- ➔ Dari pelajaran diatas, maka harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah – jauh.
- ➔ Salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan muncul wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

DEFINISI UMKM

Menteri Negara Koperasi & UKM :

UMKM adalah: Usaha kecil termasuk usaha mikro merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp.200 Juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata pertahun Rp. 1 Milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri.

➔ Usaha Kecil & Mikro :

- ➔Milik Individu (WNI)
- ➔Berbadan Hukum
- ➔Kekayaan bersih maksimal Rp.200 Juta
- ➔Hasil penjualan (nilai omzet) rata-rata Rp. 1 Milyar pertahunnya.

USAHA MENENGAH:

Adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 Juta – Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Klasifikasi Usaha dilihat dari Nilai Kekayaannya :

NILAI KEKAYAAN	
USAHA KECIL & MIKRO	**Maksimal Rp. 200 Juta**
USAHA MENENGAH	**Rp. 200 Juta – Rp. 10 Milyar**
USAHA BESAR	**Diatas Rp. 10 Milyar**

BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)

Usaha kecil adalah perusahaan (baik yang berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai tenaga kerja 5-9 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha.

Klasifikasi Usaha dilihat dari Jumlah Tenaga Kerjanya:

JUMLAH TENAGA KERJA	
USAHA KECIL & MIKRO :	1 – 4 Orang
USAHA MENENGAH :	20 – 99 Orang
USAHA BESAR :	Diatas 99 Orang

Departemen Industri & Perdagangan:

(UU No.9 Tahun 1995) Usaha Kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta dan mempunyai nilai penjualan Rp. 1 Milyar atau kurang pertahunnya.

CONTOH-CONTOH UMKM:

- Petani tunalahan
- Nelayan tanpa perahu
- Industri kecil (skala rumah tangga)
- Usaha kerajinan tangan
- Pedagang kecil/asongan
- Pengecer koran, dan seterusnya.

Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, antara lain:

MASALAH INTERNAL:

1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM
2) Keterbatasan modal dan askes terhadap pasar dan perbankan
3) Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang

MASALAH EKSTERNAL:

1) Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil,
2) Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan,
3) Kurangnya dukungan,
4) Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

UMKM sebagai sebuah Organisasi ekonomi/bisnis memiliki ciri spesifik:

- Struktur ekonomi organisasi sangat sederhana
- Mempunyai karakter khas
- Tanpa elaborasi
- Tanpa staf yang berlebihan
- Pembagian kerja yang lentur
- Memiliki hirarki manajemen yang kecil
- Sedikit aktivitas yang diformalkan

- Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan
- Jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan
- Jumlah karyawan sedikit
- Pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan
- Sistem akuntansi kurang baik (biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan)

Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Sektor Industri untuk berkembang :

1. *Poor Decesion making ability*, yakni lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan.
2. *Management imcompetence*, yakni ketidakmampuan manajemen.
3. *Lack of experience*, yakni kurang berpengalaman
4. *Poor financial control*, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan.

5. *Deterioration of working capital*, yakni kemerosotan posisi modal kerja,
6. *Declining sales*, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan.
7. *Declining profit*, yaitu buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan.
8. *Icreasing debt*, sebaliknya hutang terus meningkat.

Kendala-kendala lain yang mempengaruhi Sulitnya Pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah, antara lain:

1) Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumberdaya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral, dimensi material lebih pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya

2) Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas (*top-down*) lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) yang berasal dari aspirasi pembangunan ditingkat *grassroot*.

3) Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material (fisik) daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial

4) Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional.

5) Mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efesien (bahkan tidak efektif) serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
6) Mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya,
7) Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin sendiri.

8) Mitos bahwa efesiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumberdaya-sumber daya masyarakat.
9) Mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya.
10) Mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan, merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan.